



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN
DAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI
DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian bagi peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi di Wilayah Nusa Tenggara Timur maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya.
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ditetapkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Kesepakatan Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Wilayah Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4) ;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perjanjian Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 598a) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Kesepakatan Waktu tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi ;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
3. Bank adalah PT. Bank Nusa Tenggara Timur atau Bank Pemerintah lainnya yang menyalurkan dana proyek-proyek yang dibiayai APBN, APBD, BUMN/BUMD, Swasta/Orang Perseorangan, Bank Dunia atau Bantuan Luar Negeri.
4. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur.
5. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
6. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang menggunakan layanan jasa konstruksi.
7. Penyedia jasa adalah badan hukum atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
13. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian.
14. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
15. Tenaga kerja yang bekerja didasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
16. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
17. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota, yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB II KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha :
 - a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ; atau
 - b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ; atau
 - c. berada di Wilayah Nusa Tenggara Timur, mewakili perusahaan dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Nusa Tenggara Timur dan atau diluar wilayah Indonesia, yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur.

BAB IV BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 10

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimana komponen upahnya diketahui, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan kecelakaan kerja, sebesar 1,74 % dari upah sebulan ;
- b. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan ;
- c. Jaminan hari tua, sebesar 5,70 % dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung penyedia jasa dan sebesar 2 % ditanggung tenaga kerja;
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 11

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran sebagai berikut :

- a. bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender;
- b. bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 1. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
 2. jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir;
- c. dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan 2 kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung secara proporsional dari upah minimum bulanan yang berlaku.

Pasal 12

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sebagai berikut :

- a. penyetoran iuran Jamsostek dilakukan oleh penyedia jasa kepada PT. Jamsostek (Persero), Cabang Nusa Tenggara Timur, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan;
- b. iuran jaminan hari tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga kerja bersangkutan ;
- c. penyetoran iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) disetorkan langsung oleh penyedia jasa kedalam rekening PT. Jamsostek (Persero), pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan melampirkan Formulir Rincian Iuran Jamsostek (Formulir Jamsostek 2).

Pasal 13

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
- a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi ;
 - b. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,15 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - d. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - e. pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 14

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau pembiayaan pekerjaan Konstruksi dilakukan secara *voor financiering*, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan Konstruksi atau pada saat menerima pembayaran phase pertama ;
- b. bertahap sesuai phase pembayaran dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran phase terakhir ;
- c. pemilihan salah satu dari ketentuan huruf a dan b tersebut dicantumkan dalam Surat Kontrak Kerja Konstruksi.

BAB IV BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 10

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimana komponen upahnya diketahui, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan kecelakaan kerja, sebesar 1,74 % dari upah sebulan ;
- b. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan ;
- c. Jaminan hari tua, sebesar 5,70 % dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung penyedia jasa dan sebesar 2 % ditanggung tenaga kerja;
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 11

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran sebagai berikut :

- a. bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender;
- b. bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 1. jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
 2. jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir;
- c. dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan 2 kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung secara proporsional dari upah minimum bulanan yang berlaku.

Pasal 12

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sebagai berikut :

- a. penyetoran iuran Jamsostek dilakukan oleh penyedia jasa kepada PT. Jamsostek (Persero), Cabang Nusa Tenggara Timur, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan;
- b. iuran jaminan hari tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga kerja bersangkutan ;
- c. penyetoran iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) disetorkan langsung oleh penyedia jasa kedalam rekening PT. Jamsostek (Persero), pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan melampirkan Formulir Rincian Iuran Jamsostek (Formulir Jamsostek 2).

Pasal 13

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
- a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi ;
 - b. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,15 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - d. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - e. pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 14

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau pembiayaan pekerjaan Konstruksi dilakukan secara voor financiering, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan Konstruksi atau pada saat menerima pembayaran phase pertama ;
- b. bertahap sesuai phase pembayaran dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran phase terakhir ;
- c. pemilihan salah satu dari ketentuan huruf a dan b tersebut dicantumkan dalam Surat Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 15

- (1) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi dananya bersumber dari APBD dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut ;
 - a. pemimpin/Bendahara Pengguna Jasa Konstruksi pada waktu mengajukan surat permintaan pembayaran kepada biro keuangan/bagian keuangan wajib mengisi formulir Nomor : 4/IK dan melampirkan Nota Perhitungan iuran Jamsostek sebagai bahan untuk perhitungan iuran Jamsostek terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang mengajukan tagihan harga kontrak sesuai phase pembayaran ;
 - b. biro Keuangan/Bagian Keuangan melampirkan formulir Nomor : 4/IK dan jumlah nota perhitungan iuran Jamsostek yang telah dibuat oleh pemimpin/bendaharawan pengguna jasa konstruksi pada saat perintah membayar uang (SPMU) untuk diteruskan ke PT. Bank Nusa Tenggara Timur setempat ;
 - c. PT. Bank Nusa Tenggara Timur pada waktu menerima SPMU atas pekerjaan konstruksi bersangkutan wajib mengadakan pemotongan iuran Jamsostek kepada penyedia jasa konstruksi sesuai nota perhitungan iuran Jamsostek yang bersangkutan ;
 - d. PT. Bank Nusa Tenggara Timur membukukan iuran Jamsostek tersebut kepada rekening PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur sesuai jumlah pemotongan tersebut pada huruf c di atas.
- (2) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dananya bersumber dari APBN dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum pembayaran iuran Jamsosteknya dilakukan sebagai berikut :
 - a. penyedia Jasa Konstruksi menyetorkan langsung iuran Jamsostek ke dalam rekening PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur ;
 - b. sel lembar bukti setoran pembayaran iuran Jamsostek tersebut pada huruf a disampaikan kepada pemimpin / bendahara pengguna jasa konstruksi sebagai bukti bahwa penyedia jasa konstruksi telah memenuhi kewajiban membayar iuran Jamsostek.
- (3) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dananya bersumber dari Inpres, LOAN dan sumber dana pemerintah lainnya pembayaran iuran Jamsostek adalah :
 - a. dilakukan oleh bendaharawan pengguna jasa Konstruksi yang bersangkutan dengan cara memotong iuran Jamsostek dari pembayaran phase pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi ;
 - b. iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor oleh bendaharawan pengguna jasa konstruksi langsung ke dalam rekening PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima.
- (4) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sumber dananya dari Swasta/Orang perseorangan, pembayaran iuran Jamsosteknya adalah sebagai berikut :
 - a. penyedia Jasa Konstruksi dan atau Orang perseorangan pemberi kerja langsung menyetor iuran Jamsostek pada saat menerima Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) sekaligus secara tunai menyetor langsung kedalam rekening PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur.
 - b. bukti setoran tersebut huruf (a) harus disampaikan kepada Pejabat Pemberi Ijin dan 1 (satu) lembar kepada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur.

Pasal 16

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, 14 dan 15 tersebut diatas PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur membantu kelancaran sarana Administrasi yang diperlukan serta mendukung kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Kabupaten/ Kota se Prpvinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 17

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.12/MEN/2007 Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 18

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu sesuai dengan Pasal 11 tersebut di atas.

Pasal 19

- (1) Penyedia jasa dan atau pemberi kerja wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerjanya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat dan PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja termaksud tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa dan atau pemberi kerja wajib :
 - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan ;
 - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumahnya ;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan ;
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja.

- (2) Penyedia Jasa atau Pemberi Kerja selanjutnya menyampaikan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur.
- (3) PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh Penyedia Jasa dan atau pemberi kerja, harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Tata cara pengajuan dan pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-12/MEN/VI/2000 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi di wilayah Nusa Tenggara Timur, dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyedia jasa Konstruksi dan atau pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Badan Teknis serta Tim Koordinasi Fungsional.
- (2) Tim Koordinasi Fungsional akan dibentuk lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penyedia jasa konstruksi dan atau pemberi kerja yang telah melaksanakan sendiri Program Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Wilayah Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2010



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M.P.



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 018

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.
 NOMOR : 15 TAHUN 2010.
 TANGGAL : 26 April 2010

Tabel 1. Tarif luran JKK dan JKM berdasarkan Nilai Kontrak Kerja Konstruksi

Tabel 1a. - Nilai Kontrak sampai Rp 100 Juta

Kontrak	luran	Kontrak	luran
1,000,000	2,000	51,000,000	122,000
2,000,000	4,000	52,000,000	124,000
3,000,000	7,000	53,000,000	127,000
4,000,000	9,000	54,000,000	129,000
5,000,000	12,000	55,000,000	132,000
6,000,000	14,000	56,000,000	134,000
7,000,000	16,000	57,000,000	136,000
8,000,000	19,000	58,000,000	139,000
9,000,000	21,000	59,000,000	141,000
10,000,000	24,000	60,000,000	144,000
11,000,000	26,000	61,000,000	146,000
12,000,000	28,000	62,000,000	148,000
13,000,000	31,000	63,000,000	151,000
14,000,000	33,000	64,000,000	153,000
15,000,000	36,000	65,000,000	156,000
16,000,000	38,000	66,000,000	158,000
17,000,000	40,000	67,000,000	160,000
18,000,000	43,000	68,000,000	163,000
19,000,000	45,000	69,000,000	165,000
20,000,000	48,000	70,000,000	168,000
21,000,000	50,000	71,000,000	170,000
22,000,000	52,000	72,000,000	172,000
23,000,000	55,000	73,000,000	175,000
24,000,000	57,000	74,000,000	177,000
25,000,000	60,000	75,000,000	180,000
26,000,000	62,000	76,000,000	182,000
27,000,000	64,000	77,000,000	184,000
28,000,000	67,000	78,000,000	187,000
29,000,000	69,000	79,000,000	189,000
30,000,000	72,000	80,000,000	192,000
31,000,000	74,000	81,000,000	194,000
32,000,000	76,000	82,000,000	196,000
33,000,000	79,000	83,000,000	199,000
34,000,000	81,000	84,000,000	201,000
35,000,000	84,000	85,000,000	204,000
36,000,000	86,000	86,000,000	206,000
37,000,000	88,000	87,000,000	208,000
38,000,000	91,000	88,000,000	211,000
39,000,000	93,000	89,000,000	213,000
40,000,000	96,000	90,000,000	216,000
41,000,000	98,000	91,000,000	218,000
42,000,000	100,000	92,000,000	220,000
43,000,000	103,000	93,000,000	223,000
44,000,000	105,000	94,000,000	225,000
45,000,000	108,000	95,000,000	228,000
46,000,000	110,000	96,000,000	230,000
47,000,000	112,000	97,000,000	232,000
48,000,000	115,000	98,000,000	235,000
49,000,000	117,000	99,000,000	237,000
50,000,000	120,000	100,000,000	240,000

Tabel 1b. - Nilai Kontrak Rp 100 Juta - Rp 500 Juta

Kontrak	luran	Kontrak	luran
100,000,000	240,000	300,000,000	620,000
110,000,000	259,000	310,000,000	639,000
120,000,000	278,000	320,000,000	658,000
130,000,000	297,000	330,000,000	677,000
140,000,000	316,000	340,000,000	696,000
150,000,000	335,000	350,000,000	715,000
160,000,000	354,000	360,000,000	734,000
170,000,000	373,000	370,000,000	753,000
180,000,000	392,000	380,000,000	772,000
190,000,000	411,000	390,000,000	791,000
200,000,000	430,000	400,000,000	810,000
210,000,000	449,000	410,000,000	829,000
220,000,000	468,000	420,000,000	848,000
230,000,000	487,000	430,000,000	867,000
240,000,000	506,000	440,000,000	886,000
250,000,000	525,000	450,000,000	905,000
260,000,000	544,000	460,000,000	924,000
270,000,000	563,000	470,000,000	943,000
280,000,000	582,000	480,000,000	962,000
290,000,000	601,000	490,000,000	981,000
300,000,000	620,000	500,000,000	1,000,000

Tabel 1c. - Nilai Kontrak Rp 500 Juta - Rp 1 Milyar

Kontrak	luran	Kontrak	luran
500,000,000	1,000,000	750,000,000	1,375,000
510,000,000	1,015,000	760,000,000	1,390,000
520,000,000	1,030,000	770,000,000	1,405,000
530,000,000	1,045,000	780,000,000	1,420,000
540,000,000	1,060,000	790,000,000	1,435,000
550,000,000	1,075,000	800,000,000	1,450,000
560,000,000	1,090,000	810,000,000	1,465,000
570,000,000	1,105,000	820,000,000	1,480,000
580,000,000	1,120,000	830,000,000	1,495,000
590,000,000	1,135,000	840,000,000	1,510,000
600,000,000	1,150,000	850,000,000	1,525,000
610,000,000	1,165,000	860,000,000	1,540,000
620,000,000	1,180,000	870,000,000	1,555,000
630,000,000	1,195,000	880,000,000	1,570,000
640,000,000	1,210,000	890,000,000	1,585,000
650,000,000	1,225,000	900,000,000	1,600,000
660,000,000	1,240,000	910,000,000	1,615,000
670,000,000	1,255,000	920,000,000	1,630,000
680,000,000	1,270,000	930,000,000	1,645,000
690,000,000	1,285,000	940,000,000	1,660,000
700,000,000	1,300,000	950,000,000	1,675,000
710,000,000	1,315,000	960,000,000	1,690,000
720,000,000	1,330,000	970,000,000	1,705,000
730,000,000	1,345,000	980,000,000	1,720,000
740,000,000	1,360,000	990,000,000	1,735,000
750,000,000	1,375,000	1,000,000,000	1,750,000

Tabel 1d. - Nilai Kontrak Rp 1 Milyar - Rp 5 Milyar

Kontrak	luran	Kontrak	luran
1,000,000,000	1,750,000	3,000,000,000	4,150,000
1,050,000,000	1,810,000	3,050,000,000	4,210,000
1,100,000,000	1,870,000	3,100,000,000	4,270,000
1,150,000,000	1,930,000	3,150,000,000	4,330,000
1,200,000,000	1,990,000	3,200,000,000	4,390,000
1,250,000,000	2,050,000	3,250,000,000	4,450,000
1,300,000,000	2,110,000	3,300,000,000	4,510,000
1,350,000,000	2,170,000	3,350,000,000	4,570,000
1,400,000,000	2,230,000	3,400,000,000	4,630,000
1,450,000,000	2,290,000	3,450,000,000	4,690,000
1,500,000,000	2,350,000	3,500,000,000	4,750,000
1,550,000,000	2,410,000	3,550,000,000	4,810,000
1,600,000,000	2,470,000	3,600,000,000	4,870,000
1,650,000,000	2,530,000	3,650,000,000	4,930,000
1,700,000,000	2,590,000	3,700,000,000	4,990,000
1,750,000,000	2,650,000	3,750,000,000	5,050,000
1,800,000,000	2,710,000	3,800,000,000	5,110,000
1,850,000,000	2,770,000	3,850,000,000	5,170,000
1,900,000,000	2,830,000	3,900,000,000	5,230,000
1,950,000,000	2,890,000	3,950,000,000	5,290,000
2,000,000,000	2,950,000	4,000,000,000	5,350,000
2,050,000,000	3,010,000	4,050,000,000	5,410,000
2,100,000,000	3,070,000	4,100,000,000	5,470,000
2,150,000,000	3,130,000	4,150,000,000	5,530,000
2,200,000,000	3,190,000	4,200,000,000	5,590,000
2,250,000,000	3,250,000	4,250,000,000	5,650,000
2,300,000,000	3,310,000	4,300,000,000	5,710,000
2,350,000,000	3,370,000	4,350,000,000	5,770,000
2,400,000,000	3,430,000	4,400,000,000	5,830,000
2,450,000,000	3,490,000	4,450,000,000	5,890,000
2,500,000,000	3,550,000	4,500,000,000	5,950,000
2,550,000,000	3,610,000	4,550,000,000	6,010,000
2,600,000,000	3,670,000	4,600,000,000	6,070,000
2,650,000,000	3,730,000	4,650,000,000	6,130,000
2,700,000,000	3,790,000	4,700,000,000	6,190,000
2,750,000,000	3,850,000	4,750,000,000	6,250,000
2,800,000,000	3,910,000	4,800,000,000	6,310,000
2,850,000,000	3,970,000	4,850,000,000	6,370,000
2,900,000,000	4,030,000	4,900,000,000	6,430,000
2,950,000,000	4,090,000	4,950,000,000	6,490,000
3,000,000,000	4,150,000	5,000,000,000	6,550,000

Tabel 1e. - Nilai Kontrak diatas Rp 5 Milyar

Kontrak	luran	Kontrak	luran
5,000,000,000	6,550,000	7,500,000,000	9,050,000
5,100,000,000	6,650,000	7,600,000,000	9,160,000
5,200,000,000	6,750,000	7,700,000,000	9,260,000
5,300,000,000	6,850,000	7,800,000,000	9,350,000
5,400,000,000	6,950,000	7,900,000,000	9,450,000
5,500,000,000	7,050,000	8,000,000,000	9,550,000
5,600,000,000	7,150,000	8,100,000,000	9,650,000
5,700,000,000	7,250,000	8,200,000,000	9,750,000
5,800,000,000	7,350,000	8,300,000,000	9,850,000
5,900,000,000	7,450,000	8,400,000,000	9,950,000
6,000,000,000	7,550,000	8,500,000,000	10,050,000
6,100,000,000	7,650,000	8,600,000,000	10,150,000
6,200,000,000	7,750,000	8,700,000,000	10,250,000
6,300,000,000	7,850,000	8,800,000,000	10,350,000
6,400,000,000	7,950,000	8,900,000,000	10,450,000
6,500,000,000	8,050,000	9,000,000,000	10,550,000
6,600,000,000	8,150,000	9,100,000,000	10,650,000
6,700,000,000	8,250,000	9,200,000,000	10,750,000
6,800,000,000	8,350,000	9,300,000,000	10,850,000
6,900,000,000	8,450,000	9,400,000,000	10,950,000
7,000,000,000	8,550,000	9,500,000,000	11,050,000
7,100,000,000	8,650,000	9,600,000,000	11,150,000
7,200,000,000	8,750,000	9,700,000,000	11,250,000
7,300,000,000	8,850,000	9,800,000,000	11,350,000
7,400,000,000	8,950,000	9,900,000,000	11,450,000
7,500,000,000	9,050,000	10,000,000,000	11,550,000

Penjelasan :

1. Nilai Kontrak kerja konstruksi yang dimaksud disini adalah setelah dikeluarkan dahulu komponen PPN dari nilai keseluruhan Kontrak.

Misalkan sebuah kontrak pekerjaan konstruksi bernilai Rp 660 juta dimana sudah termasuk PPN didalamnya, maka nilai kontrak yang digunakan untuk perhitungan luran Jamsostek adalah Rp 660 juta x 100/110 atau Rp 600 juta.

2. luran untuk kontrak terendah pada Tabel 1 a. (dibawah Rp 1.000.000) diberlakukan luran sebesar Rp 2.000.

3. luran untuk kontrak diantara dua baris tabel dikenakan tarif dibawahnya:

Misal:

a. Kontrak Rp 12.800.000 dikenakan tarif luran Rp 28.000.

b. Kontrak Rp 13.000.000 dikenakan tarif luran Rp 31.000.

4. luran untuk kontrak diatas Rp 5 Milyar, dihitung dengan rumus:

luran = Rp 6.550.000 + 0,10 % x (Nilai Kontrak - Rp 5 Milyar)

dengan pembulatan ribuan rupiah.

Misal: Kontrak Rp 11,50 Milyar dikenakan tarif luran sebesar

luran = Rp 6.550.000 + 0,10 % (Rp 11,5 Milyar - Rp 5 Milyar)

luran = Rp 6.550.000 + Rp 6.500.000 = Rp 13.050.000

Tabel 2. Tarif luran JKK dan JKM berdasarkan Komponen Upah Pekerja Konstruksi

Tabel 2a. - Komponen Upah sampai dengan Rp 10 Juta

Upah	luran	Upah	luran
100,000	2,000	5,100,000	104,000
200,000	4,000	5,200,000	106,000
300,000	6,000	5,300,000	108,000
400,000	8,000	5,400,000	110,000
500,000	10,000	5,500,000	112,000
600,000	12,000	5,600,000	114,000
700,000	14,000	5,700,000	116,000
800,000	16,000	5,800,000	118,000
900,000	18,000	5,900,000	120,000
1,000,000	20,000	6,000,000	122,000
1,100,000	22,000	6,100,000	124,000
1,200,000	24,000	6,200,000	126,000
1,300,000	26,000	6,300,000	128,000
1,400,000	28,000	6,400,000	130,000
1,500,000	30,000	6,500,000	132,000
1,600,000	32,000	6,600,000	134,000
1,700,000	34,000	6,700,000	136,000
1,800,000	36,000	6,800,000	138,000
1,900,000	38,000	6,900,000	140,000
2,000,000	40,000	7,000,000	142,000
2,100,000	42,000	7,100,000	144,000
2,200,000	44,000	7,200,000	146,000
2,300,000	46,000	7,300,000	148,000
2,400,000	48,000	7,400,000	150,000
2,500,000	51,000	7,500,000	153,000
2,600,000	53,000	7,600,000	155,000
2,700,000	55,000	7,700,000	157,000
2,800,000	57,000	7,800,000	159,000
2,900,000	59,000	7,900,000	161,000
3,000,000	61,000	8,000,000	163,000
3,100,000	63,000	8,100,000	165,000
3,200,000	65,000	8,200,000	167,000
3,300,000	67,000	8,300,000	169,000
3,400,000	69,000	8,400,000	171,000
3,500,000	71,000	8,500,000	173,000
3,600,000	73,000	8,600,000	175,000
3,700,000	75,000	8,700,000	177,000
3,800,000	77,000	8,800,000	179,000
3,900,000	79,000	8,900,000	181,000
4,000,000	81,000	9,000,000	183,000
4,100,000	83,000	9,100,000	185,000
4,200,000	85,000	9,200,000	187,000
4,300,000	87,000	9,300,000	189,000
4,400,000	89,000	9,400,000	191,000
4,500,000	91,000	9,500,000	193,000
4,600,000	93,000	9,600,000	195,000
4,700,000	95,000	9,700,000	197,000
4,800,000	97,000	9,800,000	199,000
4,900,000	99,000	9,900,000	201,000
5,000,000	102,000	10,000,000	204,000

Tabel 2b. - Komponen Upah Rp 10 Juta - Rp 50 Juta

Upah	luran	Upah	luran
10,000,000	204,000	30,000,000	612,000
10,500,000	214,000	30,500,000	622,000
11,000,000	224,000	31,000,000	632,000
11,500,000	234,000	31,500,000	642,000
12,000,000	244,000	32,000,000	652,000
12,500,000	255,000	32,500,000	663,000
13,000,000	265,000	33,000,000	673,000
13,500,000	275,000	33,500,000	683,000
14,000,000	285,000	34,000,000	693,000
14,500,000	295,000	34,500,000	703,000
15,000,000	306,000	35,000,000	714,000
15,500,000	316,000	35,500,000	724,000
16,000,000	326,000	36,000,000	734,000
16,500,000	336,000	36,500,000	744,000
17,000,000	346,000	37,000,000	754,000
17,500,000	357,000	37,500,000	765,000
18,000,000	367,000	38,000,000	775,000
18,500,000	377,000	38,500,000	785,000
19,000,000	387,000	39,000,000	795,000
19,500,000	397,000	39,500,000	805,000
20,000,000	408,000	40,000,000	816,000
20,500,000	418,000	40,500,000	826,000
21,000,000	428,000	41,000,000	836,000
21,500,000	438,000	41,500,000	846,000
22,000,000	448,000	42,000,000	856,000
22,500,000	459,000	42,500,000	867,000
23,000,000	469,000	43,000,000	877,000
23,500,000	479,000	43,500,000	887,000
24,000,000	489,000	44,000,000	897,000
24,500,000	499,000	44,500,000	907,000
25,000,000	510,000	45,000,000	918,000
25,500,000	520,000	45,500,000	928,000
26,000,000	530,000	46,000,000	938,000
26,500,000	540,000	46,500,000	948,000
27,000,000	550,000	47,000,000	958,000
27,500,000	561,000	47,500,000	969,000
28,000,000	571,000	48,000,000	979,000
28,500,000	581,000	48,500,000	989,000
29,000,000	591,000	49,000,000	999,000
29,500,000	601,000	49,500,000	1,009,000
30,000,000	612,000	50,000,000	1,020,000

14

Tabel 2c. - Komponen Upah Rp 50 Juta - Rp 100 Juta

Upah	Iuran	Upah	Iuran
50,000,000	1,020,000	75,000,000	1,530,000
51,000,000	1,040,000	76,000,000	1,550,000
52,000,000	1,060,000	77,000,000	1,570,000
53,000,000	1,081,000	78,000,000	1,591,000
54,000,000	1,101,000	79,000,000	1,611,000
55,000,000	1,122,000	80,000,000	1,632,000
56,000,000	1,142,000	81,000,000	1,652,000
57,000,000	1,162,000	82,000,000	1,672,000
58,000,000	1,183,000	83,000,000	1,693,000
59,000,000	1,203,000	84,000,000	1,713,000
60,000,000	1,224,000	85,000,000	1,734,000
61,000,000	1,244,000	86,000,000	1,754,000
62,000,000	1,264,000	87,000,000	1,774,000
63,000,000	1,285,000	88,000,000	1,795,000
64,000,000	1,305,000	89,000,000	1,815,000
65,000,000	1,326,000	90,000,000	1,836,000
66,000,000	1,346,000	91,000,000	1,856,000
67,000,000	1,366,000	92,000,000	1,876,000
68,000,000	1,387,000	93,000,000	1,897,000
69,000,000	1,407,000	94,000,000	1,917,000
70,000,000	1,428,000	95,000,000	1,938,000
71,000,000	1,448,000	96,000,000	1,958,000
72,000,000	1,468,000	97,000,000	1,978,000
73,000,000	1,489,000	98,000,000	1,999,000
74,000,000	1,509,000	99,000,000	2,419,000
75,000,000	1,530,000	100,000,000	2,040,000

Tabel 2d. - Komponen Upah diatas Rp 100 Juta

Upah	Iuran	Upah	Iuran
100,000,000	2,040,000	300,000,000	6,120,000
110,000,000	2,244,000	310,000,000	6,324,000
120,000,000	2,448,000	320,000,000	6,528,000
130,000,000	2,652,000	330,000,000	6,732,000
140,000,000	2,856,000	340,000,000	6,936,000
150,000,000	3,060,000	350,000,000	7,140,000
160,000,000	3,264,000	360,000,000	7,344,000
170,000,000	3,468,000	370,000,000	7,548,000
180,000,000	3,672,000	380,000,000	7,752,000
190,000,000	3,876,000	390,000,000	7,956,000
200,000,000	4,080,000	400,000,000	8,160,000
210,000,000	4,284,000	410,000,000	8,364,000
220,000,000	4,488,000	420,000,000	8,568,000
230,000,000	4,692,000	430,000,000	8,772,000
240,000,000	4,896,000	440,000,000	8,976,000
250,000,000	5,100,000	450,000,000	9,180,000
260,000,000	5,304,000	460,000,000	9,384,000
270,000,000	5,508,000	470,000,000	9,588,000
280,000,000	5,712,000	480,000,000	9,792,000
290,000,000	5,916,000	490,000,000	9,996,000
300,000,000	6,120,000	500,000,000	10,200,000

Penjelasan :

1. Iuran terendah adalah Rp 2.000 (Tabel 2.a)
2. Iuran untuk komponen upah diantara dua baris tabel dikenakan tarif dibawahnya:

Misal:

- a. Upah Rp 10.750.000 dikenakan tarif iuran Rp 214.000.
- b. Upah Rp 11.000.000 dikenakan tarif iuran Rp 224.000.

3. Iuran untuk Komponen Upah diatas Rp 500 Juta; dihitung berdasarkan rumus:

Iuran = 224 % x Jumlah Komponen Upah
(dibulatkan dalam ribuan rupiah).

Misal :

Untuk Jumlah Komponen Upah sebesar Rp 575 Juta, maka jumlah iuran dihitung sebagai berikut :

Iuran = 2,04 % x Rp 575 Juta

Iuran = Rp 11.730.000



FRANS LEBU RAYA *mp*

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.
 NOMOR : 15 TAHUN 2010.
 TANGGAL : 26 April 2010

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA KERJA

1. Nama Perusahaan/Kontraktor :
 2. No. Pendaftaran Proyek :

No	Nama Pekerjaan	Upah Per-Hari	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Keamanan		
2.	Pembantu Kerja		
3.	Pekerja		
4.	Pekerja Kepala		
5.	Pembantu Tukang		
6.	Tukang Batu		
7.	Tukang Kayu		
8.	Tukang Besi		
9.	Tukang Kepala		
10.	Mandor		
12.	Mandor Kepala		
13.	Pembantu Mekanik		
14.	Pembantu Sopir/Operator		
15.	Sopir S'M A		
16.	Sopir SIM BI		
17.	Sopir SIM BII		
18.	Operator		
19.	Administrasi Lapangan		
20.	Pelaksanaan Lapangan		
21.	Lain-lain		

Mengetahui,
 Pengawas / Direksi Lapangan

....., 20.....
 Disetujui oleh,
 Pimpinan Perusahaan Kontraktor

(.....)
 Jabatan

(.....)
 Jabatan

TEMBUSAN :

1. Pemborong/Kontraktor/Pemilik Bangunan
 2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kupang

Catatan : *) Coret yang tidak perlu



[Handwritten Signature]
 FRANS LEBU RAYA M.P.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.
NOMOR : 15 TAHUN 2010.
TANGGAL : 26 April 2010

PENDAFTARAN PROYEK KONSTRUKSI

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
- Nomor Telpn :
3. Sumber Pembiayaan proyek : APBN / APBD TK. I / APBD TK. II / SWASTA
 NASIONAL / SWASTA ASING *)
4. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) :
5. Nilai Komponen Upah dari NKKK :
6. Macam Pekerjaan :
7. Lokasi Proyek :
8. Nomor IMB-PB/Tanggal :
9. Nomor IMB/Tanggal :
10. Pemilik Proyek :
11. Jumlah Tenaga Kerja :
12. Masa Pertanggungan/Masa Kontrak :
- s/d
13. Jenis Pertanggungan :
14. Keterangan Lain-lain :

Disetujui oleh,
PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
KANTOR CABANG NUSA TENGGARA TIMUR

....., 20

Disetujui oleh,
Pimpinan Perusahaan

(.....)
Kepala

(.....)
Jabatan

TEMBUSAN :

1. Pemborong/Kontraktor/Pemilik Bangunan
2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kupang

Catatan : *) Coret yang tidak perlu



....., 20

.....
FRANS LEBU RAYA MP